



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)

Herni Djohanis

Pascasarjana Universitas Tadulako

Mustainah M

Pascasarjana Universitas Tadulako

Nawawi Nasir

Pascasarjana Universitas Tadulako

Program Magister Ilmu Administrasi Publik

hdjohanis@gmail.com

***Abstrak** The policy for selling 3 (three) kilogram Liquefied Petroleum Gas Cylinders according to the highest retail prices shows problems in the implementation process. The problems in question include, among other things, a lack of understanding of the policy goals and objectives, a lack of resources, facilities and infrastructure, implementing agents who do not understand their main tasks and functions well, resulting in the policy implementation process not being optimal. By looking at the existing phenomena, the author conducted research, aiming to analyze and provide an overview of the Implementation of Sales Policy for 3 (three) Kilograms Liquefied Petroleum Gas Cylinders According to the Highest Retail Price (Study in South Luwuk District). The location of this research includes South Luwuk District and The Natural Resources Section of the Regional Secretariat of Banggai Regency. The theory used in this research is the theory of public policy implementation from Van Metter and Van Horn ¹. The research method uses a qualitative approach, and the informant selection technique uses purposive sampling. The number of research informants was 7 (seven) people. Data collection techniques are observation, interviews and documents. In accordance with the results of the discussion based on research facts, it was concluded that the Implementation of the Sales Policy for Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Cylinders According to the Highest Retail Price (Study in South Luwuk District) was not optimal because the six indicators of the policy implementation, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, attitudes/tendencies (disposition) of implementers, communication between organizations and implementing activities, as well as the state of the economic, social and political environments show that conditions are not going well.*

Keywords: *Highest Retail Price; Public Policy Implementation; Liquefied Petroleum Gas*

Abstrak Kebijakan Penjualan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Sesuai Harga Eceran Tertinggi menunjukkan permasalahan dalam proses implementasinya. Permasalahan yang dimaksud antara lain belum ada pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, kurangnya sumber daya, sarana dan prasarana, agen pelaksana yang tidak memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik sehingga mengakibatkan proses implementasi kebijakan tidak maksimal. Dengan melihat fenomena yang ada, maka penulis melakukan penelitian, bertujuan ingin menganalisis dan memberi gambaran Implementasi Kebijakan Penjualan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Studi di Kecamatan Luwuk Selatan). Lokasi penelitian ini mencakup Kecamatan Luwuk Selatan dan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi Kebijakan Publik dari Van Metter dan Van Horn ². Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, serta teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Informan penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Sesuai dengan hasil pembahasan berdasarkan fakta-fakta penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penjualan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Sesuai Harga Eceran

¹ Aslinda, *Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan*, revisi (Yogyakarta: K-Media, 2023).

² Aslinda.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

Tertinggi (Studi di Kecamatan Luwuk Selatan) belum maksimal. Karena enam indikator implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta keadaan lingkungan ekonomu, sosial dan politik menunjukkan kondisi yang belum berjalan baik.

Kata Kunci: *Harga Eceran Tertinggi (HET); Implementasi Kebijakan Publik; Liquefied Petroleum Gas*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan³. Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan⁴.

Bahan bakar menjadi kebutuhan paling utama penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan itu memiliki manfaat dalam memperlancar kegiatan rutinitas sehari-hari, bahan bakar diproduksi dari energi yang dapat membantu kehidupan manusia dengan berbagai jenis misalnya minyak bumi dan gas alam.⁵

LPG merupakan bahan bakar berupa Gas yang dicairkan (Liquefied Petroleum Gasses) dan merupakan produk minyak bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan industri.⁶ Pada tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia mulai menerapkan program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG). LPG merupakan bahan bakar berupa gas yang dicairkan (Liquefied Natural Gasses) dan merupakan produk minyak bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan industri, dalam menjalankan tugas yang mendasar yaitu memenuhi kebutuhan konsumen akan bahan bakar minyak, PT. Pertamina sebagai produsen menerapkan bermacam cara atau metode pendistribusian barang agar sampai pada konsumen, salah satu cara adalah produksi gas dalam kemasan tabung 3 Kg atau disebut *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg yang disubsidi penuh oleh Pemerintah agar konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Penggunaan LPG sebagai pengganti minyak tanah selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin juga bisa menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN. Berdasarkan Permen ESDM No.26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG dilakukan dengan sistem tertutup, dan pengguna terdiri dari : 1.) Rumah tangga dengan kelas ekonomi dibawah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), 2.) usaha mikro.

LPG 3 Kilogram merupakan program dari pemerintah, maka diperlukan penetapan harga maksimum yang merupakan batas tertinggi harga penjualan yang wajib dipatuhi produsen, dalam hal ini Harga Eceran tertinggi (HET). Penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 253.K/12/MEM/2020 tentang Harga Patokan Liquefied

³ Slamet Agus et al., "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan," *Wacana* 16, no. 2 (2013): 79–96, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

⁴ Ratih Anggareni, Soesilo Zauhar, and Siswidiyanto, "Evaluasi Kebijakan Publik: (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2013).

⁵ Nurhasnah Hasyim et al., "Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 129–53, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1054>.

⁶ Miriam Wullur and Jean Mantiri, "Implementasi Kebijakan Tabung Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tondano Selatan," *Universitas Negeri Manado* 4, no. 1 (2007): 88–100.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

Petroleum Gas Tabung 3 Kg. Penetapan ini melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg. Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, maka pemerintah membuat peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum gas Tabung 3 (kilogram) di Provinsi Sulawesi Tengah, berikut penetapan HET :

Tabel Daftar Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Radius (jarak) dari Supply Point SPBE	HET/Tabung 3 Kg
1.	0-60 Km	Rp.18.000
2.	61-120	Rp.19.900
3.	121-180	Rp.21.800
4.	181-240	Rp.23.000
5.	241-300	Rp.24.200
6.	301-360	Rp.25.400
7.	361-420	Rp.26.600
8.	421-480	Rp.27.800
9	481-5402	Rp.29.000

Sumber : JDIH Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai merupakan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 23 Kecamatan dan terdapat satu SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) milik PT. Trio Arba Putra yang beralamat di Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara. SPPBE ini melayani pengisian dan pengangkutan Bulk LPG beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun agen LPG di Kabupaten Banggai, terdapat 6 agen yaitu PT. Asri Gas Kilongan Permai, PT. Baharudin Tjatjo, PT. Mita Guna Usaha, PT. Mitra Gas Sejati, PT. Ophy Lianto Katili, PT. Pratama Sukses Bersama. Keenam agen tersebut wajib mematuhi dan menggunakan standar harga penjualan LPG 3 kg sesuai dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan jarak antara Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang terletak d Desa Biak Kecamatan Luwuk Timur yang berjarak sekita 20 Km dengan Kecamatan Luwuk Selatan, maka HET LPG 3 Kg adalah Rp.18.000,- sesuai pada papan reklame yang dipajang pada tiap pangkalan tertera HET LPG 3 Kg sebesar Rp. 18.000,- namun pihak pangkalan menjual dengan harga Rp. 25.000,- pertabung dan bukan hanya terjadi pada satu atau dua pangkalan namun pada semua pangkalan di Kecamatan Luwuk Selatan. Masalah lainnya terdapat warung-warung harian yang menjual LPG 3 Kg diatas harga HET bahkan membuat lonjakan harga yang fantastis yaitu Rp.45.000,- sampai dengan Rp.50.000,- per tabung. Pencatatan KTP atau kartu keluarga pada saat pembelian LPG 3 Kg dipangkalan resmi agar bisa tepat sasaran tidak serta merta membuat perubahan signifikan.

Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa begitu lemahnya implementasi kebijakan Penjualan LPG Tabung 3 Kg sesuai HET. Beberapa hal berkontribusi dalam kenaikan harga eceran tertinggi yaitu belum

ada pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, penetapan kelompok sasaran program yang tidak tegas sehingga menjadi celah ketidak tepatan sasaran penerima LPG tabung 3 Kg, masih kurangnya sumber daya yaitu jumlah personil yang terbatas dalam melakukan pengawasan harga LPG tabung 3 Kg dan kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengawasan. Masalah lainnya adalah sarana dan prasarana terkait jumlah pangkalan di Kecamatan Luwuk Selatan yang masih tergolong sedikit yaitu hanya memiliki 52 pangkalan LPG dengan jumlah fakir miskin di Kecamatan Luwuk Selatan menurut data BPS Tahun 2019 sejumlah 4.201 jiwa dan jumlah usaha mikro aset dibawah 50juta Kecamatan Luwuk Selatan berjumlah 778 jiwa. Agen pelaksana yang tidak memahami bagaimana tugas pokok dan fungsinya menjadikan keberhasilan implementasi kebijakan sulit diraih, bagi perusahaan swasta yaitu agen maupun pangkalan memiliki latar belakang profit yang sangat bertolak belakang dengan organisasi pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik. Pemahaman dan pengetahuan para implementor kebijakan menjadikan sikap dalam menyikapi dan bertindak terkait implementasi kebijakan cenderung berbeda-beda. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam melakukan pengawasan harga LPG tabung 3 Kg dengan tidak adanya layanan pengaduan dan informasi bagi masyarakat dalam memberikan pengeluhan serta laporan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan agen maupun pangkalan LPG, sehingga masyarakat hanya memberikan keluhan melalui akun sosial media. Rantai komunikasi antar organisasi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banggai dan agen/pangkalan LPG belum berjalan dengan baik, serta sosialisasi tentang kebijakan HET LPG 3 Kg kepada masyarakat belum maksimal. Hal lainnya yang mempengaruhi kenaikan HET LPG 3 Kg yaitu berubahnya preferensi konsumen LPG non subsidi menjadi konsumen LPG 3 Kg.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong minat peneliti untuk mengkaji dan menelaah serta untuk memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, dengan mengamati dan menganalisa fenomena yang tampak dilapangan, dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Penjualan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Studi di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai).

KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat dari Carl J. Frederick dalam Leo Agustiono menjelaskan bahwasanya pengertian dari kebijakan adalah serangkaian tingkah laku yang dibuat oleh seseorang, komunal mauoun pemerintahan dalam cakupan tertentu yang didalamnya sering ditemuka hambatan dan juga peluang atas implementasi dari usulan yang telah dilakukan untuk meraih tujuan yang ditetapkan. Cakupan terkait studi kebijakan memiliki barasan yang sangat luas sebab meliputi banyak aspek misalnya perekonomian, sosial, perpolitikan, kultur budaya, hukum dan lain-lain. Berdasarkan hierarkinya maka kebijakan sendiri bisa diklasifikasikan ke dalam kebijakan yang sifatnya lokal, regional, dan juga nasional contohnya terkait perundang-undangan, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah perdanam hingga keputusan Bupati ataupun Walikota.⁷

Kebijakan publik secara umum dapat dimaknai sebagai suatu keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pihak eksekutif dan/atau legislatif untuk mengatasi masalah publik sehingga

⁷ Nabila Septia Warman et al., “Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Pekanbaru,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 1, no. 2 (2022): 132–48, <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.161>.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Menurut pendapat Dunn bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan⁸. Dari Nugroho sendiri memberikan pengertian atau mendefinisikan kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara⁹. Riant Nugroho mengemukakan tujuan kebijakan publik¹⁰, yaitu :

- a. Sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan bertujuan menyerap sumber daya negara.
- b. *Regulatif* dan *deregulatif*, kebijakan regulative bersifat mengatur dan membatasi.
- c. *Dinamisasi* dan *stabilisasi*, kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki, sedangkan kebijakan stabilisasi adalah menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada.
- d. Memperkuat negara dan pasar, kebijakan memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran negara. Sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau kebijakan publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara.

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat berdasarkan hasil proses analisis kebijakan terhadap suatu masalah publik yang hendak diselesaikan menurut prosedur atau tahapan proses kebijakan. Analisis kebijakan versi Dunn adalah analisis kebijakan yang dipahami sebagai sebuah aktifitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan¹¹. Adapun proses analisis kebijakan tersebut oleh Dunn diilustrasikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tahap-Tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Fase	Karakteristik
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,

⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik DiKatakan, Dimengerti, dikuasai Oleh Pejabat Tinggi Pemerintah* (Jakarta, 2017).

⁹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik :Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan* (Jakarta: Alfabeta, 2021), [http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano Guevara%2C Karen Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano%20Guevara%20Karen%20Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD%20DE%20MACROINVERTEBRADOS%20ACUÁTICOS%20Y%20SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

¹⁰ S.S.M.S. Dedi Epriadi et al., *KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA: Konsep, Teori Dan Aplikasi* (EDU PUBLISHER, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=WH-2EAAAQBAJ>.

¹¹ Rokim, "Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 60–69.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

	konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan

(sumber : William M. Dunn, 2003:24-25)

Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan menjadi semakin marak dibicarakan seiring semakin banyak pakar yang memberikan pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Pemahaman tentang implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran¹².

Selanjutnya menurut Smith mengemukakan ada empat variabel dalam proses implementasi yang perlu diperhatikan¹³, yaitu :

1. Kebijakan yang diidealkan yakni pola interaksi ideal yang didefinisikan yang berusaha diinduksikan.
2. Kelompok sasaran (*target groups*) yaitu mereka yang paling langsung dipengaruhi oleh kebutuhan dan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumusan kebijakan.
3. *Implementing organization* yaitu mereka atau badan-badan pelaksana dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factor* yaitu unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Teori Implementasi Kebijakan

Model George C. Edward III

Edward III mengemukakan dua pertanyaan pokok¹⁴, yaitu :

- (1) Hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagian suatu implementasi yang berhasil?
- (2) Apa saja yang menjadi penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi?

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, maka dirumuskan ada empat faktor atau variabel merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut, yakni :

¹² Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana," *Jurnal Adminstrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–100, <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.

¹³ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, ed. Dede Mariana and Caroline Paskarina, 1st ed. (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung, 2006).

¹⁴ Agus Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan < Implementasi Dan Evaluasi, Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*, pertama (Surabaya: PT. Menuju Insan Cemerlang, 2020).

1.) Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

2.) Resources (sumberdaya)

Mencakup empat komponen yakni, staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; Authority (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

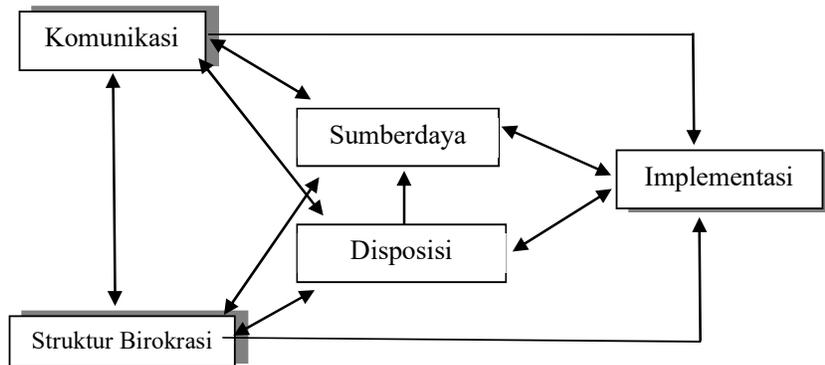
3.) Disposisi

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

4.) Stuktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (Sandard Operating Procedures), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat adhoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

Hal ini dapat digambarkan pada model berikut ini :



Gambar model Direct and Indirect Impact on Implementation oleh Edward III

Model Van Metter dan Van Horn

Van Metter dan Van Horn dalam teorinya berawal dari argumentasi bahwa perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi seta model konseptual yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Mereka menegaskan bahwa “perubahan, control, dan kepatuhan bertindak” merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Van Metter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut ¹⁵:

- (1) Jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan,
- (2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi.

¹⁵ Subianto.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

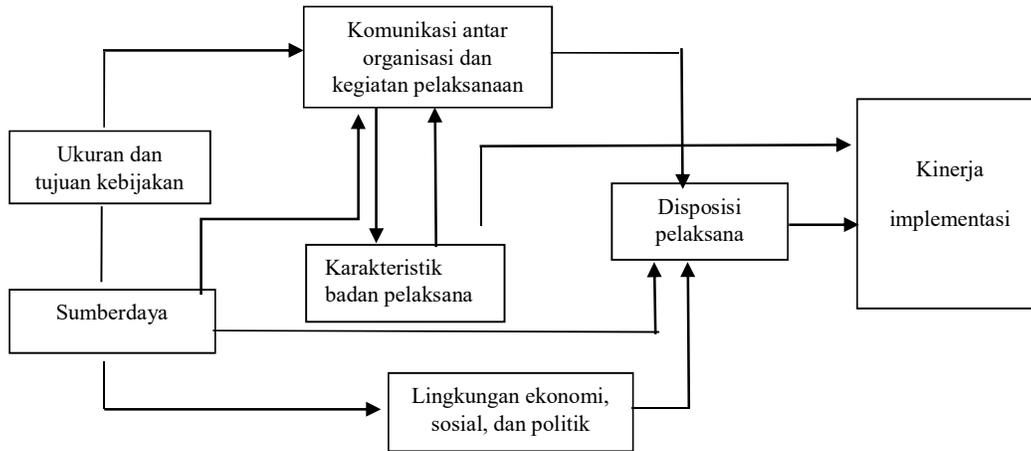
Van metter dan Van Horn dalam buku *The Policy Implementation Proces : A Consepual Framework*, menjelaskan bahwa :”implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Van Metter dan Van Horn mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut *A Model of Policy Implementation*¹⁶, yaitu :

- 1.) Standar dan Tujuan Kebijakan (Standard and Objectives), ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan pelaksana kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Standar dan tujuan tidak langsung berdampak pada disposisi pelaksana melalui kegiatan komunikasi interorganisasi. Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja, apa pengaruh ini terhadap variabel dependent ditengahu variabel independent lain. Jelas yang memberikan pelayanan publik dan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana standar dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakkan hukum.
- 2.) Sumber Daya (Resources), artinya dalam implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Karena dengan sumber daya kebijakan merupakan faktor keberhasilan proses implementasi. Adapun sumber daya kebijakan meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu.
- 3.) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan (Interorganizational comunication and enforcement activities) memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Implementasi akan berjalan efektif jika terjadi ketetapan komunikasi dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.
- 4.) Karakteristik organisasi pelaksana (Characteristic of the implementing agencies) adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin, hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijaka harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetpakan sebelumnya. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor.
- 5.) Kondisi-kondisi ekonomi (economic social and political conditions) pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Van Metter dan Van Horn mengungkapkan ; “sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung

¹⁶ Aslinda, *Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan*.

keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan”

- 6.) Sikap para pelaksana (the disposition of implementors), Van Metter dan Van Horn berpendapat bahwa adapun komponen yang menjadi faktor dalam melaksanakan implementasi Kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar Model The Policy Implementation Proses oleh Van Meter dan Van Horn

Model Merilee S. Grindle

Model implementasi Grindle menegaskan bahwa ; keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang dirancang sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang dirancang dan pembiayaan cukup¹⁷. Model Grindle ini mencakup dua faktor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu : (1) muatan kebijakan (*policy content*) dan (2) Konteks Implementasi. Variabel terikat didalam model adalah *oucomes* kebijakan namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan proyek dilaksanakan sesuai rencana. Selanjutnya Grindle juga mengatakan selain variabel yang telah disebutkan di atas dalam mengimplementasikan suatu program ditentukan oleh Konten (isi) program/policy dan konteks dalam implementasinya, sebagai berikut ¹⁸:

1) *Content of policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

¹⁷ Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, 1st ed. (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015).

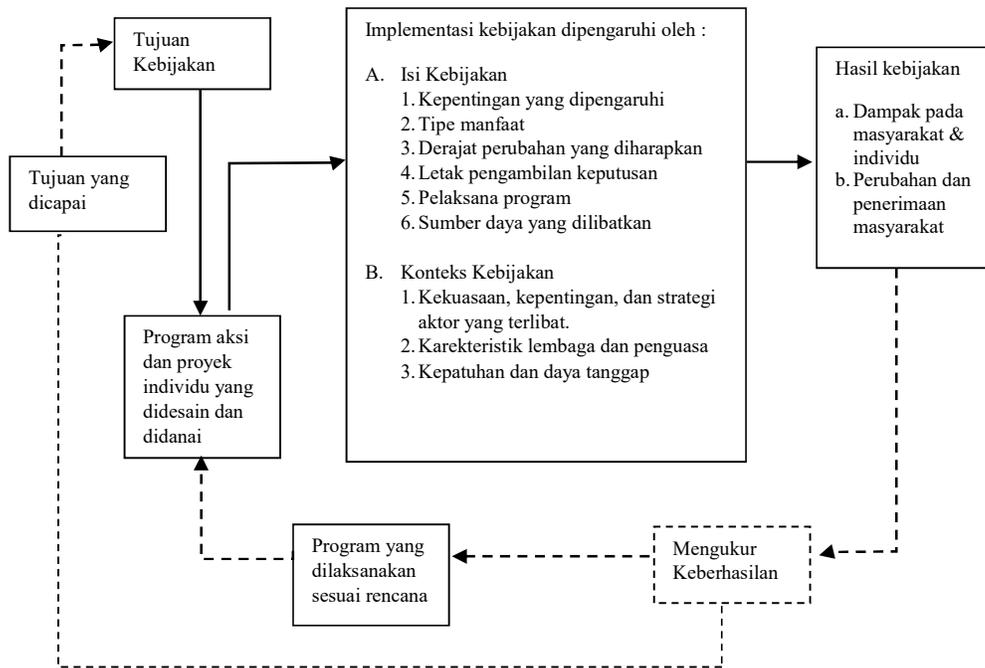
¹⁸ Aslinda, *Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan*.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

- a) kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program,
artinya apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.
 - b) Manfaat yang akan dihasilkan
Artinya kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat kolektif atau manfaat terhadap orang banyak sehingga program akan lebih mudah diimplementasikan, karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran
 - c) Perubahan yang diinginkan
Perubahan dalam suatu kebijakan biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun hasilnya belum mampu memperbaiki tantangan kebijakan dalam implementasi di Indonesia.
 - d) Pengambilan keputusan
Pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.
 - e) Pelaksana program
Implementasi program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, sehingga keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kebijakan.
 - f) Sumber daya yang tersedia dan berkualitas
Dalam mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.
- 2) *Context of Implementation* (Konteks Implementasi)
- Dalam konteks implementasi artinya suatu kebijakan atau program yang baik sangat ditentukan oleh implementasi program tersebut karena sebarang baik dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :
- a) Kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat.
Strategi dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya untuk mencapai output kebijakan.
 - b) Karakteristik Lembaga
Implementasi suatu program sangat ditentukan oleh Lembaga yang mengimplementasikan program tersebut.

Menurut Grindle untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan dan organisasi lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif dan negatif. Jika lingkungan berpandangan positif maka lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi, sebaliknya jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil

langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya kepada masyarakat¹⁹. Secara ilustrasi model Merilee S. Grindle dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Gambar Model Implementation as a political and administrative process oleh Merilee S. Grindle.

Dari ketiga model implementasi yang diuraikan di atas merupakan model implementasi yang dikenal dengan pendekatan top down, dan dari keempat model tersebut yang berdampak langsung dan langsung pada model implementasi Van Metter dan Van Horn, penulis anggap sangat relevan dengan Implementasi Kebijakan Penjualan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Sesuai Harga Eceran Tertinggi di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Keenam indikator yang mempengaruhi implementasi dalam model ini sangat mendukung implementasi program sehingga semuanya dapat terlaksana secara ideal.

Konsep Liquified Petroleum Gas

LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan guna memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas Propana (C3), Butana (C4) atau campuran keduanya (Mix LPG) 2. LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Selama ini masih banyak salah pengertian mengenai apa dan darimana sumber LPG diperoleh, menurut kata harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari Liquified Petroleum Gas yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Sehingga sumber utama penghasil LPG sebenarnya adalah minyak bumi, bukan gas bumi.²⁰

¹⁹ Aslinda.

²⁰ Wawan Ardi Subakdo and Yuwono Ario Nugroho, "In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi LPG 3KG Di Indonesia," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, no. November (2016): 1–10, https://www.researchgate.net/publication/354688431_IN-BOUND_DAN_OUT-BOUND_LOGISTIC_PADA_DISTRIBUSI_LPG_3KG_DI_INDONESIA%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/749.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

Pengertian *Liquified Petroleum Gas* menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tertentu di Daerah adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butanam atau campuran keduanya.²¹

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah²². Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Pada penelitian teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Untuk metode analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana²³, yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi kebijakan Harga Liquified Petroleum Gas tabung 3 Kilogram Pemerintah Kabupaten Banggai mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran tertinggi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah bahwa dalam rangka optimalisasi harga eceran tertinggi LPG 3 Kg dihitung berdasarkan radius jarak dari supply point Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

Bagaimana pentingnya implementasi suatu kebijakan dimana tahapan ini ditentukan apakah berhasil atau gagal suatu kebijakan, ditentukan oleh keberhasilan dari pengimplementasiannya, karena suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dan untuk alasan ini pula maka peneliti juga menguraikan proses Implementasi Kebijakan Penjualan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg sesuai Harga Eceran Tertinggi studi di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, dengan melihat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi berdasarkan temuan-temuan pokok dilapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn tentang 6 (enam) variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antar kebijakan dan kinerja (*performance*) kebijakan publik.

Ukuran dan tujuan kebijakan yang ideal, jelas, terukur serta realistis dapat mempermudah dan meminimalisir kesulitan yang akan menghambat proses implementasi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Demikian sebaliknya, tujuan dan ukuran kebijakan dianggap berlebihan akan memberi dampak dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pembelian LPG 3 Kg dari pangkalan ke agen sudah berhasil digital, namun lembaga pelaksana dalam hal ini agen dan pangkalan LPG 3 Kg bermotif *profit oriented*, tidak mampu berkomitmen untuk menjaga tujuan kebijakan yang bermotif sosial dengan mengenyampingkan tujuan utama

²¹ Ellisa Vikalista, "311 Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal , Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013," *Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal II* (2013): 311–19.

²² Dwi Kurniawati et al., "Implementasi Kebijakan Supervisi Akademik Dan Manajerial Pada Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Palu," *Katalogis* 10, no. 1 (2022): 64–72.

²³ M B Miles, A M Huberman, and J Saldana, *Qualitative Data Analysis* (SAGE Publications, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

organisasi. Sedangkan masyarakat penerima sasaran mengerti dengan mengikuti semua peraturan. Selain itu peran pemerintah daerah harus tegas dalam mengambil langkah untuk menentukan berapa jumlah penerima manfaat dan membuka layanan pengaduan masyarakat terkait dengan program LPG 3 Kg baik itu melalui kantor Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten. Hal lainnya adalah belum adanya bentuk ketegasan dalam menentukan HET LPG 3 Kg di kios-kios perumahan, sehingga terdapat disparitas harga yang dapat memicu aksi penyelewenan LPG 3 Kg.

Sumber daya merupakan hal wajib yang tersedia dalam implementasi suatu kebijakan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan untuk diimplementasikan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan baik. Namun untuk sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan Het LPG 3 Kg bisa dikatakan masih terbatas, ketersediaan tenaga masih minim baik itu tenaga pegawai maupun tenaga pengawas itu sendiri. Demikian pula sarana dan prasarana yang dianggap masih minim adalah jumlah pangkalan dan jatah LPG 3 Kg, karena sebaran pangkalan yang kurang proporsional seharusnya tidak menumpuk pada satu kelurahan saja yaitu itu Kelurahan Maahas. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kelancaran pendistribusian LPG 3 Kg.

Karakteristik agen pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur dan bagan organisasi menjelaskan karakteristik organisasi, menjelaskan mekanisme dan alur tugas yang harus dikerjakan oleh setiap unsur personal yang bekerja di dalam sistem organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, yang berdasarkan kompetensi dan profesional. Yang diteliti lebih lanjut pada penelitian ini adalah bagaimana para pegawai menjalankan tugas dan fungsinya dan bagaimana pengawasan terhadap penjualan LPG 3 Kg sesuai HET. Dari hasil yang didapatkan, pelaksanaan pengawasannya belum berjalan dengan optimal. Harusnya dilakukan pengawasan secara intensif ke pihak agen dan pangkalan, dan melakukan survey ke masyarakat agar dapat diketahui secara jelas, apakah LPG 3 Kg sudah sesuai dengan aturan bahwa penerima merupakan masyarakat sasaran atau bukan, dan tidak adanya aturan melalui surat keputusan kepala daerah bekerja sama dengan Pertamina agar diberi sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan para agen dan pangkalan. Jangan ada kecenderungan para personil yang bersikap permisif pada pelanggaran yang dilakukan para agen dan pangkalan.

Van Metter dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni pemahaman tentang kebijakan, penerimaan, netralitas atau penolakan terhadap kebijakan, dan intensitas tanggapan itu²⁴. Dalam penelitian ini sikap para pelaksana yang akan diteliti adalah respon, sikap, pengetahuan dan pemahaman beserta keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan. Hasil yang didapatkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan HET LPG 3 Kg menunjukkan dukungan dan perhatian terhadap pelaksanaan kebijakan, sikap dan perilaku sesuai dengan aturan kebijakan, salah satu bentuk perhatian terhadap kebijakan tersebut adalah dengan adanya Surat Edaran dari Bupati Banggai Nomor 540/0602/Bag.SDA tentang pelarangan penggunaan LPG 3 Kg bagi ASN, TNI, POLRI, usaha Makro. Namun surat ini perlu dibarengi dengan sikap dan perilaku tegas yang dilakukan secara konsisten terhadap penegakkan peraturan agar mampu mendorong sikap dan perilaku para pelaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dibuat.

²⁴ B Winamo, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus : Edisi Dan Revisi Terbaru* (Center for Academic Publishing Service, 2012), <https://books.google.co.id/books?id=4vvVuQAACAAJ>.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJUALAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS KECAMATAN
LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI)*

Pada dasarnya komunikasi merupakan interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam menyampaikan tujuan-tujuan atau maksud tertentu, agar pihak-pihak yang terlobat dalam proses komunikasi itu dapat memahami konten yang di komunikasikan baik secara langsung atau melalui media-media komunikasi. Tentunya dalam proses komunikasi ini, komunikasi dapat menggunakan teknik atau media yang dianggap bisa membantu dalam proses komunikasi. Dalam proses implementasi kebijakan HET LPG 3 Kg di Kecamatan Luwuk Selatan, komunikasi dalam bentuk koordinasi yang telah dilakukan akan tetapi belum optimal karena harga LPG 3 Kg tetap dijual di atas HET. Pasar murah LPG 3 Kg yang dilakukan 2 (kali) setahun, sosialisasi dalam bentuk pertemuan baik itu di kantor Camat Luwuk Selatan maupun di aula Kantor Bupati Kabupaten Banggai, membuat stempel untuk layanan pengaduan, dan mengeluarkan surat edaran Bupati tentang pelarangan penjualan LPG 3 Kg pada yang bukan kelompok sasaran, namun tidak memberikan perubahan terhadap agen dan pangkalan yang masih berlandaskan *profit* (keuntungan) dalam transaksi jual beli LPG 3 Kg. Masalah lainnya adalah Pemerintah Daerah tidak memiliki hal untuk memberikan sanksi terhadap agen, pangkalan, dan pengguna yang bukan termasuk kelompok sasaran.

Variabel ditawarkan Van Metter dan Van Horn yaitu bagaimana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Menurut mereka, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.²⁵ Dari hasil yang didapat, diketahui bahwa dari lingkungan ekonomi yaitu disparitas harga LPG 3 Kg atau LPG bersubsidi dengan LPG non subsidi membuat masyarakat yang bukan termasuk golongan kelompok sasaran ikut membeli LPG 3 Kg, dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan dalam menaikkan harga LPG 3 Kg tidak sesuai HET dapat mempengaruhi inflasi dan kenaikan harga lainnya. Untuk lingkungan sosial dipengaruhi dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Dan terakhir ditinjau dari lingkungan politik, harusnya ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Banggai sebagai tindak lanjut dari Pergub, agar sesuai dengan realita yang terjadi dimasyarakat, dan harus ada tekanan dari DPRD Kabupaten Banggai sebagai wakil rakyat yang fungsinya menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan diatas berdasarkan fakta-fakta penelitian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi Kebijakan Penjualan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Studi di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai belum di implementasi dengan baik, disebabkan dari keenam indikator implementasi kebijakan yaitu ukura dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*), komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan kondisi yang belum berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Slamet, Purwanto, Sumartono, and M.Makmur. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan." Wacana 16, no. 2 (2013): 79-96. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Revisi. Bandung, 2016.
- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana." Jurnal Adminstrasi Publik 1, no. 1 (2010): 1-100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.

²⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Revisi (Bandung, 2016).

